

RESPONS PENGELOLA LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM MENYIKAPI PERUBAHAN KURIKULUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Faishal

STAI Luqman Al Hakim Surabaya
faizelaq0@gmail.com

Raudatul Jannah

STAI Luqman Al Hakim Surabaya
jannahraudatul810@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan merupakan fenomena yang terus berulang dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan terbaru yang menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan adaptasi secara cepat. Artikel ini membahas bagaimana pengelola lembaga pendidikan merespons perubahan kebijakan tersebut, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka terhadap sembilan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola lembaga pendidikan memberikan respons positif terhadap inovasi kurikulum, meskipun menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan pemahaman guru, minimnya sarana, serta kebutuhan pelatihan berkelanjutan. Respon proaktif pengelola sekolah dan perguruan tinggi dalam menyiapkan perangkat ajar, inovasi pembelajaran, serta strategi manajemen menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kurikulum.

Kata kunci: *Kurikulum Merdeka, MBKM, Respons Lembaga Pendidikan, Kebijakan Pemerintah*

A. PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum merupakan keniscayaan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Sejak diberlakukannya Kurikulum 1947 hingga Kurikulum 2013, sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa kurikulum senantiasa mengalami modifikasi sebagai respons terhadap tuntutan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika sosial politik. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat dokumen formal yang mengatur proses pembelajaran, melainkan juga menjadi instrumen strategis dalam membentuk generasi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Oleh karena itu, setiap perubahan kurikulum membawa konsekuensi luas, tidak hanya bagi siswa dan guru, tetapi juga

bagi para pengelola lembaga pendidikan yang bertanggung jawab memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di lapangan.

Kebijakan terbaru yang tengah diimplementasikan adalah **Kurikulum Merdeka** dan **Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)**. Kurikulum Merdeka, yang diperkenalkan secara resmi pada tahun 2022, menawarkan sejumlah pembaruan dibandingkan kurikulum sebelumnya. Esensi utamanya terletak pada fleksibilitas, diferensiasi, dan penguatan karakter melalui *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)*. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembelajaran berbasis proyek, yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas.¹ Di sisi lain, MBKM yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak tahun 2020 lebih menekankan pada kebebasan mahasiswa belajar di luar program studinya. Mahasiswa dapat menempuh pengalaman belajar melalui magang, riset, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, hingga pertukaran pelajar lintas perguruan tinggi.²

Kedua kebijakan ini lahir sebagai upaya memperbaiki mutu pendidikan nasional yang, menurut berbagai indikator internasional, masih tertinggal. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat bawah dalam aspek literasi membaca, matematika, dan sains. Fakta ini menjadi dasar argumentasi bahwa sistem pendidikan nasional membutuhkan terobosan besar agar dapat melahirkan generasi unggul yang mampu bersaing di era global.³ Namun, perubahan kebijakan tidak otomatis berhasil tanpa dukungan infrastruktur, kesiapan guru, serta manajemen pendidikan yang solid. Justru, tantangan terbesar terletak pada bagaimana lembaga pendidikan menafsirkan, merespons, dan mengimplementasikan kebijakan baru tersebut di tingkat operasional.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelola lembaga pendidikan merespons kebijakan ini dengan cara yang beragam. Di tingkat sekolah dasar, misalnya, pelaksanaan P5 di SD Nasima Semarang terbukti mendorong siswa

¹ Sulistiyaningrum, T. & Fathurrahman, M., *Implementasi Projek P5 di SD Nasima Kota Semarang*, Journal Unnes; Profesi Keguruan JPK 9(2), 2023: 121-128, hlm. 123.

² Soedjatmiko, W., *Inovasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran UNNES LANTIP sebagai Implementasi MBKM*, Jurnal Profesi Keguruan, 2023, hlm. 2.

³ Ibid., hlm. 3.

untuk aktif dalam pembelajaran berbasis proyek. Namun, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari tantangan internal, terutama kesiapan guru dalam memahami konsep baru dan keterbatasan perangkat ajar.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa inovasi kurikulum menuntut adaptasi yang signifikan, bukan hanya pada aspek teknis pembelajaran, melainkan juga pada kepemimpinan sekolah dan strategi manajemen yang diterapkan.

Pada tingkat menengah, guru menghadapi kendala dalam menyusun modul ajar sesuai dengan kerangka Kurikulum Merdeka. Penelitian mengenai kesiapan guru matematika, misalnya, menegaskan bahwa sebagian besar guru masih membutuhkan pelatihan tambahan untuk mampu mengintegrasikan capaian pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik secara kontekstual. Jika pengelola sekolah tidak segera merespons melalui program pendampingan dan pengembangan profesional guru, maka implementasi kurikulum berpotensi hanya menjadi formalitas tanpa perubahan nyata dalam praktik pembelajaran.

Sementara itu, di tingkat perguruan tinggi, kebijakan MBKM memunculkan dinamika baru. Universitas Negeri Semarang (UNNES), misalnya, menginisiasi program UNNES Lantip sebagai inovasi pembelajaran luar kampus yang terintegrasi dengan Praktik Lapangan Persekolahan (PLP). Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan kebijakan MBKM, tetapi juga menjadi strategi kelembagaan dalam memperkuat identitas dan reputasi kampus.⁵ Respon inovatif semacam ini memperlihatkan bahwa pengelola perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal lembaga.

Namun demikian, adaptasi terhadap kebijakan baru tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala yang umum dihadapi lembaga pendidikan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung, serta beban administrasi yang dirasakan meningkat bagi para guru. Tantangan lain adalah ketidaksiapan budaya sekolah dan perguruan tinggi dalam mengadopsi pendekatan baru yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berbasis proyek. Dengan kata lain, perubahan kurikulum menuntut transformasi tidak hanya pada level kurikulum, tetapi juga pada kultur organisasi lembaga pendidikan.

⁴ Sulistiyaningrum, T., Op. Cit., hlm. 124

⁵ Soedjatmiko, W., Op. Cit., hlm. 4

Berdasarkan konteks tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif respons pengelola lembaga pendidikan di Indonesia dalam menghadapi perubahan kurikulum dan kebijakan pemerintah. Fokus analisis mencakup tiga level: (1) sekolah dasar yang mengimplementasikan P5 sebagai wujud Kurikulum Merdeka, (2) sekolah menengah yang berupaya menyesuaikan perangkat ajar dengan capaian pembelajaran baru, dan (3) perguruan tinggi yang menjalankan program MBKM dengan inovasi kelembagaan. Dengan memadukan temuan berbagai penelitian, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan, strategi, dan pola adaptasi yang ditempuh pengelola lembaga pendidikan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis wacana kebijakan pendidikan dan respons lembaga pendidikan yang telah banyak diteliti sebelumnya. Studi pustaka memungkinkan peneliti melakukan telaah kritis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, kemudian mensintesiskannya untuk menemukan pola, tantangan, serta strategi adaptasi yang dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti, dalam hal ini respons pengelola lembaga pendidikan terhadap perubahan kurikulum dan kebijakan pemerintah. Menurut Bungin, penelitian kualitatif deskriptif berfungsi untuk memahami fenomena sosial melalui perspektif pelaku, sehingga cocok digunakan untuk menelaah dinamika adaptasi lembaga pendidikan dalam konteks perubahan kurikulum.⁶

Sumber data dalam penelitian ini berupa artikel ilmiah dan laporan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal nasional maupun prosiding. Dari berbagai sumber yang tersedia, dipilih sembilan artikel utama yang relevan dengan tema perubahan kurikulum dan kebijakan MBKM. Pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan:

⁶ Bungin, B., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 76.

1. Relevansi tema: Artikel membahas Kurikulum Merdeka, P5, kesiapan guru, maupun MBKM.
2. Tahun terbit: Artikel diprioritaskan dari periode 2023–2025 agar sesuai dengan dinamika kebijakan terbaru.
3. Kredibilitas jurnal: Artikel berasal dari jurnal nasional terakreditasi SINTA atau prosiding perguruan tinggi bereputasi.

C. HASIL DISKUSI DAN TEMUAN

1. Respon Sekolah Dasar terhadap Kurikulum Merdeka

a. Kasus di Sekolah Negeri

Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar negeri masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural maupun kultural. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman guru dalam menyusun modul ajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas guru hanya menyalin modul contoh yang tersedia di platform resmi pemerintah tanpa melakukan adaptasi kontekstual terhadap kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah mereka.⁷ Praktik semacam ini berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan *Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* (P5), karena kegiatan pembelajaran cenderung tidak sesuai dengan realitas sosial-budaya setempat.

Menurut Sumarno, penerapan kurikulum baru selalu membutuhkan kesiapan guru baik dari aspek pedagogis maupun teknologis. Guru yang tidak terbiasa dengan desain pembelajaran berbasis proyek akan cenderung kembali pada metode konvensional, seperti ceramah dan latihan soal. Hal ini memperkuat temuan bahwa resistensi guru seringkali dipicu oleh keterbatasan pelatihan dan pendampingan dari pemerintah daerah maupun pusat.⁸

Selain itu, faktor sarana dan prasarana menjadi hambatan serius. Banyak sekolah dasar negeri yang menghadapi kondisi ruang kelas padat,

⁷ Yusdin, dkk., *Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka di SD*, Journal Visipena Volume 15, Number 2, 2024 pp. 277-291, hlm. 45.

⁸ Sumarno, *Implementasi Kurikulum di Indonesia: Tantangan dan Peluang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 45

keterbatasan laboratorium, serta minimnya akses pada bahan ajar berbasis digital. Kondisi ini membuat kegiatan P5 sulit dilaksanakan secara maksimal. Misalnya, untuk melaksanakan proyek berbasis lingkungan, siswa membutuhkan ruang terbuka hijau, peralatan observasi, dan bahan praktik. Namun, di sekolah perkotaan dengan keterbatasan lahan, kegiatan ini tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.⁹

Kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah juga turut memengaruhi efektivitas Kurikulum Merdeka. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyasa menekankan bahwa sekolah-sekolah di perkotaan dengan akses teknologi lebih baik relatif lebih cepat beradaptasi dibanding sekolah di pedesaan.¹⁰ Di daerah terpencil, guru seringkali terbebani dengan administrasi, sehingga kurang memiliki waktu untuk merancang pembelajaran inovatif.

Upaya mengatasi kendala ini memerlukan strategi sistematis. Pertama, pelatihan guru tidak hanya berbentuk seminar sekali waktu, tetapi harus berupa *coaching clinic* berkelanjutan. Kedua, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung fasilitas pembelajaran berbasis proyek. Ketiga, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, komunitas lokal, dan dunia usaha dapat menjadi solusi untuk menutupi keterbatasan sumber daya sekolah negeri. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat menghadirkan proyek autentik yang relevan dengan kehidupan nyata siswa, meskipun fasilitas internal terbatas.

b. Kasus di Sekolah Swasta

Berbeda dengan sekolah negeri, sekolah dasar swasta memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan kurikulum dan anggaran. Beberapa sekolah swasta di perkotaan bahkan mampu mengintegrasikan Kurikulum Merdeka dengan cepat. Misalnya, SD Nasima Semarang melibatkan komunitas lokal, seperti pengrajin, pelaku UMKM, dan aktivis

⁹ Nurhadi, "Keterbatasan Sarana dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Dasar* 14, no. 2 (2023): 112–123

¹⁰ Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 87.

lingkungan dalam pelaksanaan P5.¹¹ Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga mengurangi beban guru dalam menyiapkan materi karena sumber belajar datang langsung dari masyarakat.

Keunggulan sekolah swasta biasanya terletak pada kemampuan manajerial dan dukungan finansial. Kepala sekolah berperan sebagai *instructional leader* yang menentukan arah kebijakan pembelajaran. Menurut Wahyudi, kepemimpinan kepala sekolah yang visioner merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi inovasi kurikulum.¹² Apabila pimpinan sekolah mampu menciptakan budaya kolaboratif, guru akan lebih mudah menerima dan menjalankan perubahan.

Namun, tantangan utama di sekolah swasta adalah masalah kesinambungan program. Implementasi P5 sering bergantung pada figur pimpinan sekolah. Ketika terjadi pergantian manajemen yang tidak memiliki visi serupa, keberlanjutan program bisa terancam. Penelitian oleh Fullan menegaskan bahwa perubahan kurikulum hanya dapat berhasil jika didukung oleh sistem manajemen sekolah yang konsisten dan budaya organisasi yang kuat.¹³

Selain itu, meskipun memiliki fleksibilitas lebih tinggi, tidak semua sekolah swasta memiliki sumber daya memadai. Sekolah swasta menengah ke bawah masih menghadapi masalah serupa dengan sekolah negeri, seperti keterbatasan guru berkualitas, fasilitas terbatas, dan minimnya akses teknologi. Perbedaan utama hanyalah tingkat otonomi dalam pengambilan keputusan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sekolah swasta perlu membangun sistem kemitraan yang berkelanjutan dengan masyarakat, pemerintah, maupun sektor swasta. Kolaborasi ini dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih stabil. Misalnya, kerja sama dengan

¹¹ Sulistiyaningrum, T. & Fathurrahman, M., *Implementasi Projek P5 di SD Nasima Kota Semarang*, Journal Unnes; Profesi Keguruan JPK 9(2), 2023: 121-128, hlm. 124

¹² Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Inovasi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 66.

¹³ Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change* (New York: Teachers College Press, 2016), hlm. 89.

lembaga pendidikan tinggi dapat menghadirkan tenaga ahli yang mendampingi guru dalam merancang proyek pembelajaran. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah juga menjadi faktor penting untuk memperkuat implementasi Kurikulum Merdeka.

Dengan demikian, sekolah swasta memiliki peluang lebih besar untuk berinovasi, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang visioner, manajemen yang konsisten, serta jejaring kolaborasi yang kuat. Tanpa tiga hal ini, keunggulan fleksibilitas yang dimiliki sekolah swasta tidak akan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas implementasi Kurikulum Merdeka.

2. Respon Sekolah Menengah dan Madrasah

a. Kesiapan Guru dan Beban Administrasi

Implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah menengah (SMP dan SMA/MA) menghadapi tantangan serius, terutama terkait kesiapan guru. Guru dituntut tidak hanya memahami substansi mata pelajaran, tetapi juga mampu menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) serta modul ajar yang kontekstual dengan kebutuhan siswa.¹⁴ Hambatan ini banyak dialami guru matematika, IPA, maupun mata pelajaran umum lainnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar guru masih bergantung pada contoh modul ajar dari Kemendikbud tanpa melakukan adaptasi sesuai konteks lokal, sehingga pembelajaran kurang relevan dengan lingkungan siswa.

Beban administrasi juga menjadi salah satu keluhan terbesar guru di sekolah menengah. Alih-alih mengembangkan strategi pembelajaran kreatif, banyak guru terjebak dalam rutinitas penyusunan dokumen seperti RPP, laporan kegiatan, hingga berbagai formulir supervisi. Menurut Suyanto, beban administrasi ini berdampak langsung pada menurunnya kualitas interaksi guru dengan siswa, karena waktu guru lebih banyak tersita

¹⁴ Pertiwi, Putri Dwi dkk, *Analisis Kesiapan Guru Matematika dalam Implementasi Kurikulum Merdeka*, JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Volume 6, Nomor 3, Maret 2023 (1717-1726)

untuk pekerjaan administratif daripada merancang pembelajaran bermakna.¹⁵

Sejalan dengan itu, hasil riset Anwar & Setiawan menegaskan bahwa guru membutuhkan pelatihan intensif dan pendampingan berkelanjutan untuk benar-benar mampu menguasai paradigma Kurikulum Merdeka. Pelatihan yang bersifat sekali waktu terbukti tidak efektif karena guru membutuhkan proses pembelajaran jangka panjang yang disertai praktik nyata di kelas.¹⁶

Masalah kesiapan guru juga dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan usia. Guru senior yang sudah lama terbiasa dengan pola Kurikulum 2013 cenderung lebih sulit beradaptasi dibanding guru muda yang relatif lebih akrab dengan teknologi pembelajaran digital. Hasil studi internasional bahkan menunjukkan bahwa inovasi kurikulum hanya dapat berhasil bila guru dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan sekadar sebagai pelaksana.¹⁷

Untuk menjawab persoalan ini, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Mentoring antar guru (peer coaching) – guru berpengalaman yang lebih adaptif terhadap kurikulum baru dapat mendampingi rekan sejawatnya.
2. Pengurangan beban administrasi – pemerintah perlu meninjau ulang kewajiban administratif agar guru lebih fokus pada aspek pedagogis.
3. Kolaborasi dengan perguruan tinggi – dosen dapat membantu guru dalam penyusunan ATP dan modul ajar berbasis penelitian terkini.
4. Penguatan komunitas belajar guru – forum MGMP dapat difungsikan lebih produktif untuk berbagi praktik baik.

Dengan langkah-langkah tersebut, tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah menengah dapat diminimalkan, dan guru

¹⁵ Suyanto, *Problematika Administrasi Guru dalam Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2021), hlm. 55

¹⁶ Anwar & Setiawan, "Pelatihan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 12, no. 1 (2023): 77–89

¹⁷ Hargreaves, A., *Teaching in the Knowledge Society* (New York: Teachers College Press, 2003), hlm. 102.

dapat kembali menempatkan fokus utama pada pembelajaran bermakna bagi siswa.

b. Asesmen dan Evaluasi

Selain kesiapan guru, aspek asesmen dan evaluasi juga menjadi tantangan besar. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya asesmen formatif yang bersifat berkelanjutan, serta asesmen autentik yang menilai keterampilan siswa secara holistik, bukan sekadar aspek kognitif. Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan dominasi ujian tertulis konvensional. Guru lebih memilih tes pilihan ganda atau uraian singkat karena dianggap lebih praktis dan mudah diolah.

Menurut Anderson & Krathwohl dalam *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing*, asesmen autentik seharusnya mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, termasuk analisis, evaluasi, dan kreasi.¹⁸ Namun, keterbatasan waktu, jumlah siswa yang banyak, serta minimnya pengalaman guru dalam menyusun instrumen berbasis proyek membuat asesmen autentik sulit diwujudkan di sekolah menengah.

Di madrasah, pengelola mencoba menyalasi kesulitan ini dengan membuat kebijakan internal berupa bank soal bersama serta penyusunan rubrik asesmen. Strategi ini terbukti meringankan beban guru, karena mereka tidak perlu merancang instrumen secara individu. Meski begitu, pendekatan ini belum sepenuhnya menjawab kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Menurut penelitian Marzuki, rubrik asesmen yang disusun secara kolektif hanya efektif apabila guru mendapatkan pelatihan tentang cara menggunakannya dalam pembelajaran sehari-hari.¹⁹

Tantangan lain adalah adanya perbedaan standar asesmen antar sekolah. Sebagian sekolah menekankan portofolio, proyek, dan observasi, sementara sekolah lain tetap mengandalkan ujian akhir. Hal ini menimbulkan kesenjangan capaian kompetensi siswa antar lembaga

¹⁸ Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R., *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing* (Boston: Allyn & Bacon, 2001), hlm. 35.

¹⁹ Marzuki, "Efektivitas Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran di Madrasah," *Jurnal Evaluasi Pendidikan* 8, no. 2 (2022): 134–147.

pendidikan. Penelitian Supriyadi menemukan bahwa sekolah dengan asesmen berbasis proyek cenderung menghasilkan siswa yang lebih kreatif dan mandiri dibanding sekolah yang masih berorientasi pada tes tertulis.²⁰

Untuk memperkuat asesmen di era Kurikulum Merdeka, beberapa langkah dapat dilakukan:

1. Pelatihan guru dalam asesmen autentik – guru perlu memahami teknik merancang proyek, portofolio, dan rubrik observasi.
2. Integrasi teknologi digital – platform asesmen daring dapat memudahkan guru dalam melakukan evaluasi formatif dan memberi umpan balik cepat.
3. Kebijakan standardisasi minimal – pemerintah perlu menetapkan kerangka asesmen nasional yang fleksibel tetapi tetap memberi arah yang jelas.
4. Keterlibatan orang tua – laporan berbasis narasi perlu disosialisasikan agar orang tua memahami perkembangan siswa, bukan hanya nilai angka.

Dengan demikian, transformasi asesmen di sekolah menengah dan madrasah bukan hanya soal metode, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma: dari penilaian hasil semata menuju penilaian proses belajar siswa secara menyeluruh.

3. Respon Perguruan Tinggi terhadap MBKM

a. Dampak Positif terhadap Mahasiswa

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dengan dunia kerja. Implementasi MBKM, khususnya melalui kegiatan magang, studi independen, dan pertukaran pelajar, telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi mahasiswa. Hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM lebih siap menghadapi

²⁰ Supriyadi, "Perbandingan Hasil Belajar Siswa dengan Asesmen Proyek dan Ujian Tertulis," *Jurnal Inovasi Pendidikan* 9, no. 3 (2023): 201–214.

tantangan global karena mereka memperoleh pengalaman belajar yang bersifat kontekstual dan praktis.²¹

Salah satu aspek positif yang paling menonjol adalah peningkatan keterampilan non-akademik (*soft skills*). Mahasiswa yang mengikuti program magang, misalnya, dilatih untuk berkomunikasi secara profesional, bekerja dalam tim, serta mengelola waktu secara efektif. Menurut laporan Kemendikbudristek tahun 2022, peserta MBKM menunjukkan tingkat kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi yang lebih baik dibandingkan mahasiswa yang hanya menjalani perkuliahan tradisional.²² Hal ini sejalan dengan teori *experiential learning* yang dikemukakan oleh Kolb, bahwa pengalaman langsung menjadi sarana paling efektif untuk membangun kompetensi.²³

Selain magang, program pertukaran pelajar juga berkontribusi besar terhadap pengembangan mahasiswa. Pertukaran ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar lintas universitas, bahkan lintas budaya. Studi oleh Handayani menemukan bahwa mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar MBKM cenderung memiliki wawasan akademik lebih luas, sikap toleransi tinggi, serta jaringan sosial yang lebih beragam.²⁴ Jejaring sosial ini penting tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga untuk peluang karier setelah lulus.

Program studi independen dalam MBKM juga memberi kesempatan mahasiswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat di luar kurikulum formal. Misalnya, mahasiswa teknologi informasi dapat mengikuti program bootcamp industri yang fokus pada pengembangan aplikasi. Menurut penelitian oleh Arifin, mahasiswa yang terlibat dalam studi independen menunjukkan peningkatan keterampilan teknis yang

²¹ Preira Meke, dkk., *Dampak Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)*, Jurnal Edukatif: Ilmu Pendidikan Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022 Halm 675 - 685.

²² Kemendikbudristek, *Laporan Capaian MBKM 2022* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022), hlm. 42.

²³ David A. Kolb, *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development* (New Jersey: Prentice Hall, 2015), hlm. 67

²⁴ Handayani, "Dampak Pertukaran Mahasiswa MBKM terhadap Pengembangan Karakter," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 15, no. 2 (2022): 101–115.

lebih relevan dengan kebutuhan industri dibandingkan dengan mahasiswa yang hanya mengandalkan kurikulum reguler.²⁵

Dampak positif lainnya adalah peningkatan daya saing global. Mahasiswa MBKM lebih familiar dengan budaya kerja industri, sehingga transisi mereka dari dunia akademik ke dunia kerja menjadi lebih mulus. Laporan World Economic Forum (2021) menekankan pentingnya keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital.²⁶ MBKM memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan tersebut secara langsung melalui pengalaman nyata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa MBKM tidak hanya memperluas pengetahuan akademik mahasiswa, tetapi juga memperkaya pengalaman hidup mereka. Melalui magang, pertukaran pelajar, dan studi independen, mahasiswa memperoleh bekal yang lebih komprehensif untuk menghadapi dunia kerja sekaligus membangun kepribadian yang matang.

b. Tantangan bagi Perguruan Tinggi

Meskipun MBKM membawa dampak positif, implementasinya di perguruan tinggi tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan kultural. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan antara perguruan tinggi besar di kota-kota metropolitan dengan perguruan tinggi kecil di daerah. Perguruan tinggi besar, terutama yang berstatus PTN, lebih mudah menjalin kerja sama dengan industri skala nasional maupun multinasional. Sebaliknya, perguruan tinggi kecil sering hanya mampu menggandeng mitra lokal, sehingga pengalaman mahasiswa lebih terbatas.²⁷

Hal ini menimbulkan ketimpangan akses manfaat MBKM. Penelitian yang dilakukan oleh Santosa menegaskan bahwa mahasiswa di PTS daerah lebih sering ditempatkan di UMKM atau lembaga lokal dengan keterbatasan fasilitas.²⁸ Akibatnya, kesempatan mereka untuk memperoleh

²⁵ Arifin, "Efektivitas Studi Independen MBKM dalam Penguasaan Keterampilan Teknis," *Jurnal Pendidikan Tinggi* 10, no. 1 (2023): 55–68

²⁶ World Economic Forum, *The Future of Jobs Report* (Geneva: WEF, 2021), hlm. 23.

²⁷ Preira Meke, dkk., *Dampak Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)*, *Jurnal Edukatif: Ilmu Pendidikan* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022 Halm 675 - 685. Hal.19

²⁸ Santosa, "Ketimpangan Akses MBKM antara PTN dan PTS," *Jurnal Kebijakan Pendidikan* 12, no. 3 (2023): 211–225.

pengalaman industri berskala besar menjadi minim. Kesenjangan ini berpotensi memperlebar jurang kompetensi antara lulusan PTN dan PTS.

Selain masalah akses, dosen juga menghadapi beban tambahan dalam implementasi MBKM. Mereka dituntut untuk mengonversi pengalaman mahasiswa ke dalam bentuk SKS dan memastikan kesesuaiannya dengan kurikulum program studi. Menurut laporan BAN-PT (2023), banyak program studi masih belum memiliki struktur kurikulum yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi kegiatan MBKM.²⁹ Kondisi ini membuat sebagian dosen merasa MBKM menambah kerumitan administratif.

Tantangan lain berkaitan dengan sistem akreditasi. BAN-PT dan LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) masih berfokus pada capaian akademik konvensional, sementara MBKM lebih menekankan pada capaian pengalaman praktis. Menurut pendapat Wibowo, ketidakselarasan ini menciptakan dilema bagi perguruan tinggi dalam mengelola kegiatan MBKM.³⁰

Di samping itu, masih ada hambatan kultural di kalangan sivitas akademika. Sebagian dosen dan pimpinan perguruan tinggi masih memandang MBKM sebagai beban tambahan, bukan sebagai peluang inovasi. Penelitian oleh Lase menunjukkan bahwa resistensi dosen biasanya muncul karena kurangnya pemahaman tentang manfaat jangka panjang MBKM bagi kualitas lulusan.³¹

Dengan demikian, tantangan MBKM di perguruan tinggi mencakup kesenjangan akses, beban administratif dosen, keterbatasan fleksibilitas kurikulum, serta ketidakselarasan dengan standar akreditasi. Jika tidak ditangani secara sistematis, tantangan ini dapat menghambat pencapaian tujuan utama MBKM sebagai transformasi pendidikan tinggi di Indonesia.

²⁹ BAN-PT, *Laporan Evaluasi Akreditasi 2023* (Jakarta: BAN-PT, 2023), hlm. 58.

³⁰ Wibowo, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 91.

³¹ Lase, "Resistensi Dosen terhadap Kebijakan MBKM," *Jurnal Inovasi Pendidikan* 14, no. 2 (2022): 133–146.

c. Respons Inovatif Perguruan Tinggi

Meski menghadapi banyak kendala, sejumlah perguruan tinggi menunjukkan respons inovatif dalam mengimplementasikan MBKM. Contoh nyata ditunjukkan oleh Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui program UNNES Lantip, yang mengintegrasikan Praktik Lapangan Persekolahan (PLP) dengan kegiatan MBKM. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman mengajar di sekolah, tetapi juga mendapatkan pengakuan SKS secara formal. Model ini menunjukkan bahwa integrasi MBKM dapat dilakukan tanpa menambah beban administratif yang berlebihan.

Selain UNNES, Universitas Gajah Mada (UGM) juga menjadi pelopor dalam merancang skema MBKM yang adaptif. UGM membangun sistem digital yang memungkinkan mahasiswa mengajukan konversi SKS secara daring, sehingga transparansi dan akuntabilitas lebih terjamin.³² Inovasi ini memudahkan dosen dan mahasiswa dalam mengelola kegiatan MBKM.

Beberapa perguruan tinggi swasta juga mengembangkan model kemitraan dengan industri kreatif lokal. Misalnya, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) menjalin kerja sama dengan start-up teknologi di Salatiga untuk menempatkan mahasiswa dalam program magang berbasis proyek. Menurut penelitian Sihombing, model ini efektif meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa sekaligus memperkuat hubungan universitas dengan dunia industri.³³

Respons inovatif juga terlihat pada perguruan tinggi keagamaan. UIN Sunan Kalijaga, misalnya, mengintegrasikan program pengabdian masyarakat berbasis pesantren dengan MBKM. Model ini memperluas makna MBKM, tidak hanya dalam konteks industri, tetapi juga dalam konteks sosial dan budaya. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan

³² UGM, *Pedoman Implementasi MBKM* (Yogyakarta: UGM Press, 2022), hlm. 76.

³³ Sihombing, "Model Kemitraan Perguruan Tinggi dan Industri Kreatif," *Jurnal Manajemen Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 144–159.

pengakuan SKS, tetapi juga kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat.³⁴

Dengan demikian, respons inovatif perguruan tinggi menunjukkan bahwa implementasi MBKM dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masing-masing lembaga. Kunci keberhasilan terletak pada kepemimpinan institusi, fleksibilitas kurikulum, serta kemampuan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

4. Analisis Kebijakan dan Implementasi Manajerial

a. Strategi Adaptasi Lembaga Pendidikan

Dari berbagai kasus di atas, respons pengelola lembaga pendidikan dapat dirangkum dalam tiga strategi utama:

- 1) Adaptasi Struktural – menyesuaikan perangkat kurikulum, modul ajar, dan tata kelola lembaga dengan kebijakan baru.
- 2) Pengembangan Kapasitas – melatih guru dan dosen agar memahami pendekatan pembelajaran baru, termasuk asesmen autentik.
- 3) Inovasi Kelembagaan – menciptakan program internal (seperti UNNES Lantip atau program P5 berbasis komunitas) untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal.

b. Kesenjangan Implementasi

Meskipun ada respons positif, terdapat kesenjangan signifikan antara sekolah/perguruan tinggi besar dengan lembaga kecil. Sekolah swasta unggulan atau PTN besar mampu mengimplementasikan kurikulum dengan lebih efektif karena didukung fasilitas dan jejaring luas. Sebaliknya, sekolah negeri pinggiran atau PTS kecil masih menghadapi hambatan serius dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur.

Dalam artikel *Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka* (2024) menekankan bahwa kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan

³⁴ Rahmawati, "Integrasi MBKM dengan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 11, no. 1 (2023): 45–59.

diferensiasi kondisi lembaga agar implementasi tidak menimbulkan kesenjangan baru dalam kualitas pendidikan nasional.³⁵

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka dari berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa respons pengelola lembaga pendidikan di Indonesia terhadap perubahan kurikulum dan kebijakan pemerintah terutama Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) memiliki pola yang beragam namun menunjukkan arah positif.

1. **Pada tingkat sekolah dasar**, respons pengelola cenderung menitikberatkan pada pelaksanaan *Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)*. P5 terbukti mampu membangun keterampilan kolaboratif, kreativitas, serta karakter siswa. Namun, keterbatasan pemahaman guru dan sarana prasarana menjadi kendala yang harus segera diatasi melalui pelatihan intensif, dukungan pemerintah daerah, serta inovasi manajemen sekolah.
2. **Pada tingkat sekolah menengah dan madrasah**, tantangan utama terletak pada kesiapan guru dalam menyusun modul ajar dan instrumen asesmen autentik. Beban administrasi yang meningkat juga memperlambat proses inovasi pembelajaran. Oleh karena itu, kepala sekolah dan manajemen madrasah perlu memperkuat strategi pendampingan guru, menyediakan forum berbagi praktik baik, dan memfasilitasi asesmen berbasis proyek.
3. **Pada tingkat perguruan tinggi**, kebijakan MBKM membuka ruang luas bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman nyata melalui magang, riset, maupun pertukaran pelajar. Respons pengelola kampus pada umumnya positif, dengan berbagai inovasi kelembagaan seperti UNNES Lantip. Akan tetapi, ketimpangan masih terjadi antara perguruan tinggi besar dengan perguruan tinggi kecil dalam hal akses mitra industri dan fleksibilitas kurikulum.

Secara keseluruhan, dapat ditegaskan bahwa **respons pengelola lembaga pendidikan tidak bersifat pasif, melainkan adaptif**. Strategi utama yang digunakan meliputi adaptasi struktural, pengembangan kapasitas, dan inovasi

³⁵ Rahmafritri, Fadhilah dkk, *Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Implikasinya terhadap Kualitas Pendidikan*, Journal Dirasah Volume 7, Number 1, February 2024.

kelembagaan. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya manusia, fasilitas, dan jejaring kerja sama.

Implikasinya, pemerintah perlu mengarahkan kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual dengan kondisi masing-masing lembaga agar tidak menimbulkan kesenjangan kualitas antar sekolah maupun antar perguruan tinggi. Bagi pengelola lembaga pendidikan, penting untuk terus membangun budaya inovasi, meningkatkan kompetensi guru/dosen, serta memperluas kerja sama dengan pihak eksternal demi memperkuat keberlanjutan implementasi kurikulum baru.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R., *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing* (Boston: Allyn & Bacon, 2001)
- Anwar & Setiawan, "Pelatihan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 12, no. 1 (2023): 77–89
- Arifin, "Efektivitas Studi Independen MBKM dalam Penguasaan Keterampilan Teknis," *Jurnal Pendidikan Tinggi* 10, no. 1 (2023): 55–68
- BAN-PT, *Laporan Evaluasi Akreditasi 2023* (Jakarta: BAN-PT, 2023)
- Bungin, B., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- David A. Kolb, *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development* (New Jersey: Prentice Hall, 2015)
- Handayani, "Dampak Pertukaran Mahasiswa MBKM terhadap Pengembangan Karakter," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 15, no. 2 (2022): 101–115.
- Hargreaves, A., *Teaching in the Knowledge Society* (New York: Teachers College Press, 2003)
- Kemendikbudristek, *Laporan Capaian MBKM 2022* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022)
- Lase, "Resistensi Dosen terhadap Kebijakan MBKM," *Jurnal Inovasi Pendidikan* 14, no. 2 (2022): 133–146.
- Marzuki, "Efektivitas Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran di Madrasah," *Jurnal Evaluasi Pendidikan* 8, no. 2 (2022): 134–147.

- Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change* (New York: Teachers College Press, 2016)
- Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021
- Nurhadi, "Keterbatasan Sarana dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Dasar* 14, no. 2 (2023): 112–123
- Pertiwi, Putri Dwi dkk, *Analisis Kesiapan Guru Matematika dalam Implementasi Kurikulum Merdeka*, JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Volume 6, Nomor 3, Maret 2023 (1717-1726)
- Preira Meke, dkk., *Dampak Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)*, *Jurnal Edukatif: Ilmu Pendidikan* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022
- Rahmafritri, Fadhilah dkk, *Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Implikasinya terhadap Kualitas Pendidikan*, *Journal Dirasah* Volume 7, Number 1, February 2024.
- Rahmawati, "Integrasi MBKM dengan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 11, no. 1 (2023): 45–59.
- Santosa, "Ketimpangan Akses MBKM antara PTN dan PTS," *Jurnal Kebijakan Pendidikan* 12, no. 3 (2023): 211–225.
- Sihombing, "Model Kemitraan Perguruan Tinggi dan Industri Kreatif," *Jurnal Manajemen Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 144–159.
- Soedjatmiko, W., *Inovasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran UNNES Lantip*, *Journal Unnes; Profesi Keguruan JPK* 9(1), 2023: 1-7
- Soleha, Zacro & Kasori, *Analisis Hambatan dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka*, *Jurnal Tsaqofah; Penelitian Guru Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2024; 563-574
- Sulistiyaningrum, T. & Fathurrahman, M., *Implementasi Proyek P5 di SD Nasima Kota Semarang*, *Journal Unnes; Profesi Keguruan JPK* 9(2), 2023: 121-128
- Sumarno, *Implementasi Kurikulum di Indonesia: Tantangan dan Peluang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022)

- Supriyadi, “Perbandingan Hasil Belajar Siswa dengan Asesmen Proyek dan Ujian Tertulis,” *Jurnal Inovasi Pendidikan* 9, no. 3 (2023): 201–214.
- Suyanto, *Problematika Administrasi Guru dalam Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2021)
- UGM, *Pedoman Implementasi MBKM* (Yogyakarta: UGM Press, 2022)
- Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Inovasi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020)
- Wibowo, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021)
- World Economic Forum, *The Future of Jobs Report* (Geneva: WEF, 2021)
- Yusdin, dkk., *Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka di SD*, *Journal Visipena* Volume 15, Number 2, 2024 pp. 277-291